

1. DRUGS

2. CONSUMER PROTECTION

KK
Per 47/00
Yun
P

SKRIPSI

VIDIA YUNARTI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT
DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT DI INDONESIA



SKRIPSI

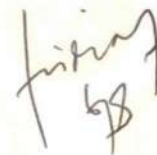
DIAJUKAN UNTUK MELengkapi TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Handajani".

Sri Handajani, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vidia Yunarti".

Vidia Yunarti
NIM. 039614397

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum preventif bagi konsumen obat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang melindungi konsumen agar tercegah dari kerugian akibat buruk pemakaian obat. Upaya perlindungan hukum ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengamanan obat dan iklan obat yang bertujuan agar obat yang beredar dalam masyarakat terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya serta masyarakat tidak dirugikan dari adanya pengaruh buruk iklan obat yang menyesatkan. Tujuan ini akan tercapai secara optimal bila kesemua peraturan tersebut dilakukan seefektif mungkin dengan pengawasan seketat mungkin. Guna perlindungan konsumen dari iklan obat yang menyesatkan, para pelaku profesi di bidang periklanan membuat suatu regulasi sendiri pada Ikrar Musyawarah Periklanan Indonesia tanggal 17 September 1981 yaitu Kode Etik Periklanan (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia). Akan tetapi baik peraturan perundang-undangan maupun regulasi sendiri ini hanya mengatur tentang etika atau pedoman dalam membuat iklan obat tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya padahal iklan mempunyai peranan yang penting bagi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan obat tersebut atau tidak serta bagaimana penggunaannya. Indonesia mempunyai

undang-undang yang mengatur masalah perlindungan konsumen secara lebih khusus dan lengkap yang akan diberlakukan pada tanggal 20 April 2000 yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**. Terhadap pelanggaran upaya perlindungan hukum represif ini, para pelaku dapat dikenai tindakan administratif dan/atau sanksi pidana.

- b. Perlindungan hukum represif bagi konsumen obat di Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang melindungi kepentingan konsumen yang telah dirugikan akibat buruk pemakaian obat. Konsumen yang menderita kerugian akibat buruk pemakaian obat berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang telah merugikannya. Dasar gugatan ganti rugi ini menggunakan aturan dalam BW yaitu untuk dasar gugatan ganti rugi akibat wanprestasi dan cacat tersembunyi: Pasal 1243 dan Pasal 1504 BW dan untuk gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 BW. Pada gugatan ganti rugi akibat wanprestasi dan cacat tersembunyi disyaratkan antara kedua belah pihak mempunyai hubungan kontraktual sehingga konsumen hanya dapat menuntut ganti rugi pada penjual tidak dapat untuk menuntut produsen. Pada gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tidak dipersyaratkan sehingga konsumen dapat menuntut ganti rugi pada penjual maupun produsen. Kelemahan dari gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum adalah beban pembuktian ada pada konsumen obat. Konsumen untuk membuktikan adanya kesalahan pada produsen dan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan kesalahan tersebut akan menemui kesulitan karena

antara konsumen dan produsen dalam posisi yang tidak seimbang baik secara ekonomi maupun pengetahuan mengenai obat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen** menawarkan dua cara penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap Daerah Tingkat II yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Putusan yang dihasilkan badan ini bersifat final dan mengikat yang kemudian dimintakan penetapan eksekusinya pada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

2. Saran

- a. Kesemua peraturan perundang-undangan dan regulasi sendiri yang melindungi kepentingan konsumen secara represif hendaknya diberlakukan seefektif mungkin dengan pengawasan seketat mungkin. Dengan ini diharapkan masyarakat mendapatkan hasil optimal dari penggunaan obat yaitu sembuh atau berkurangi gejala penyakitnya seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkannya. Untuk pengaturan tentang penandaan dan informasi obat termasuk iklan obat saya sarankan untuk diatur lebih rinci lagi dan pengawasannya lebih diperketat terutama untuk iklan obat di media massa yang sekarang sudah terlihat beberapa iklan obat yang melanggar etika periklanan. Hal ini diperlukan mengingat

hal ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen akibat penggunaan obat yang salah atau secara tidak rasional. Konsumen hendaknya berhati-hati dalam memilih obat yang akan digunakannya dan menggunakannya sesuai aturan pakai yang ada.

- b. Pemerintah hendaknya menyebarkan informasi lebih gencar dan lebih lengkap pada masyarakat tentang upaya apa yang dapat mereka lakukan bila mereka menderita kerugian akibat suatu produk obat. Untuk mengatasi kesulitan konsumen dalam hal pembuktian, hendaknya para hakim yang menangani dan menyelesaikan sengketa tersebut menggunakan pembalikan beban pembuktian atau pemerintah menerapkan sistem tanggung gugat ketat (*strict liability*). Dengan pembalikan beban pembuktian, maka produsen yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tidak ada hubungan kausal antara produknya dengan kerugian yang diderita konsumen. Hal ini wajar karena produsen adalah pihak yang lebih mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan produknya. Dalam sistem tanggung gugat ketat, konsumen cukup menyatakan dirinya menderita kerugian setelah menggunakan obat dan produsen obat tersebut wajib bertanggung gugat atas hal tersebut kecuali produsen dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi akibat kesalahan konsumen sendiri atau konsumen ikut bersalah dalam menimbulkan kerugian. Penyebaran informasi tentang upaya penyelesaian sengketa konsumen yang disediakan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hendaknya lebih digiatkan terutama upaya penyelesaian di luar pengadilan yang lebih mungkin untuk



memberikan kepuasan pada masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah dibanding dengan bersengketa di pengadilan.

